



Media Title	Kompas		
Head Line	Menanti Kebijakan Radikal		
Date	22 Des 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	3	Article Size	
Journalist	Che	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Menanti Kebijakan Radikal

Penutupan Pintu Tol Dalam Kota Tidak Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menerapkan langkah radikal untuk mengatasi parahnya kemacetan lalu lintas. Penambahan angkutan massal dan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi idealnya berjalan seiring dengan rekayasa lalu lintas, termasuk penutupan pintu tol dalam kota.

"Kemacetan di Jakarta kini sudah benar-benar parah. Penambahan kendaraan pribadi akan membuat jalanan seperti tempat parkir raksasa. Saatnya untuk sedikit 'memaksa' orang menggunakan angkutan umum," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Sabtu (21/12).

Tigor khawatir rekayasa lalu lintas tanpa dukungan kebijakan radikal hanya membuat keinginan mengurai kemacetan tidak maksimal. Akibatnya, langkah itu hanya akan memindahkan kemacetan di suatu kawasan ke daerah yang lain.

Tigor mengatakan masih menunggu janji Pemprov DKI Jakarta membanjiri Ibu Kota dengan angkutan umum. Sebagai urat nadi transportasi massal selain kereta api, keberadaan angkutan umum, terutama bus, selama ini jauh dari kondisi ideal.

Menurut data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, saat ini ada 579 bus transjakarta dan 103 bus angkutan perbatasan terintegrasi transjakarta. "Kondisi tersebut belum ideal," kata Tigor.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi Tulus Abadi menambahkan, kebijakan jalan ber-

bayar elektronik (ERP) harus segera diberlakukan. ERP yang dikombinasikan dengan tarif parkir mahal dan pajak progresif kendaraan diyakini bisa mengalihkan pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. ERP ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2014.

"Kebijakan ekstrem Kementerian Perhubungan juga bisa diterapkan. Ada satu hari dalam seminggu pegawai Kemenhub diharuskan menggunakan kendaraan umum," katanya.

Penutupan pintu tol

Sementara itu, di tengah gencarnya tuntutan publik untuk menerapkan kebijakan ekstrem, langkah "setengah hati" malah terlihat pada rekayasa lalu lintas. Uji coba penutupan 3 *ramp* (pintu keluar tol) dan 1 pintu masuk Tol Dalam Kota yang efektif mengurai kemacetan malah tidak dilanjutkan.

Namun, sistem buka tutup kemungkinan akan menjadi cara bertindak atau rekayasa lalu lin-

tas di lokasi tersebut yang disesuaikan dengan situasi kepadatan arus lalu lintasnya.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto dan Direktur Operasional PT Jasa Marga Tbk Hasanudin secara terpisah, kemarin.

Uji coba itu sendiri berlangsung di Tol Dalam Kota ruas Cawang-Semangi-Grogol selama lima hari, mulai dari Senin (16/12) hingga Jumat (20/12).

Tiga *ramp* yang ditutup adalah Tegal Parang, Pancoran, dan RS Dharmais pada pukul 08.00-pukul 10.00. Pintu masuk tol yang buka tutup adalah Semangi 1 pada pukul 16.00-pukul 20.00.

Rikwanto mengatakan, dari hasil analisis dan evaluasi kepolisian dan Jasa Marga, diputuskan uji coba penutupan 3 *ramp* dan 1 gerbang tol (GT) untuk sementara tidak dilanjutkan pada minggu ini. "Kami masih mengevaluasi untuk menghitung lebih cermat kondisi lalu lintas keseluruhan," katanya.

Menurut dia, uji coba tak dilanjutkan mengingat kapasitas pintu keluar alternatif tidak dapat menampung lalu lintas peralihan. Apalagi, masyarakat belum bisa diajak mengatur waktu keberangkatan. Pihaknya juga belum bisa membagi arus lalu lintas.

Berdasarkan kondisi itu, kata Rikwanto, kepolisian mencoba mengurai kepadatan arus lalu lintas di Semangi dengan melakukan sistem buka tutup pada pintu masuk dan pintu keluar. Waktunya disesuaikan dengan kepadatan arus.

Direktur Operasional Jasa Marga Hasanudin mengatakan, GT Semangi 1 tidak bisa ditutup total pada petang hari selama 4 jam, tetapi harus buka tutup situasional. Tidak ditutup bukan karena pemasukan tol berkurang, melainkan semata-mata karena penutupan itu kian menambah kemacetan di Semangi. "Uji coba itu hanya mengurangi pendapatan kami Rp 12 juta-Rp 15 juta per hari," katanya. (CHE/RTS)